#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan publik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Partai Politik memiliki kedudukan dan peranan sentral dan penting dalam setiap paham demokrasi. Karena itu partai politik biasa disebut sebagai pilar utama demokrasi karena mereka yang memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negara.

Indonesia telah menganut sistem multipartai sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Begitu pula saat pemerintahan Orde Baru telah menganut sistem multipartai namun didominasi oleh satu partai. Pasca keruntuhan Orde Baru, sistem multipartai kembali hidup dan menjadi bagian dari sistem politik nasional yang memberikan ruang bagi kelahiran dan keberadaan partai politik baru.

Euforia politik diekspresikan dengan menjamurnya partai politik baru pada pemilu pertama pasca reformasi tahun 1999. Pada pemilu 1999, yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup, diikuti oleh 48 partai peserta pemilu. Jumlah calon partai yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman

sebelumnya berjumlah 141. Tetapi setelah diseleksi tidak semuanya dapat mengikuti Pemilihan Umum 1999. Partai politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu hanya 48 partai. Pasca pemilu ini menghasilkan enam partai besar pemenang pemilu, dimana PKB, PAN dan PBB yang merupakan partai politik baru berhasil menjadi bagian dari enam partai politik pemenang pemilu 1999.

Tahun 2004 merupakan tahun pertama dilaksanakannya Pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu secara langsung mendaulat Indonesia sebagai negara paling demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Perubahan Pemilu tersebut juga mengakibatkan perubahan strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses modernisasikan diri<sup>2</sup>

Hasil Pemilu 2004 kembali menjadi bukti nyata bahwa kemunculan partai politik baru tidak bisa dipandang sebelah mata. Partai politik baru berhasil mendapatkan suara pemilih yang cukup signifikan. Termasuk Partai Demokrat yang merupakan partai baru yang berhasil memperoleh suara besar menyaingi tiga partai baru yang sebelumnya telah ikut serta dalam pemilu tahun 1999.

Begitu pula dengan Pemilu 2014, dimana kembali muncul partai baru yaitu Partai Nasional Demokrat sebagai partai baru yang hadir di dalam perpolitikan Indonesia yang secara resmi lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Miriam Budiardjo, <br/> Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,<br/>2008), hal.450

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid.,hal.397

dan Kementerian Hukum dan HAM, yang berarti Partai Nasional Demokrat berhak ikut dalam Pemilu 2014. Hasil dari pemilu 2014, Partai Nasional Demokrat pun berhasil mendapatkan suara pemilih yang cukup signifikan jika dilihat dari waktu terbentuknya partai tersebut.

Latar belakang kelahiran partai Nasional Demokrat diawali dengan proses pembentukan Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat. Ormas Nasional Demokrat merupakan sebuah jawaban dari kejenuhan dari para pendiri Nasional Demokrat melihat situasi yang dipertontonkan oleh partai politik di senayan.

Perkembangan anggota Partai Nasional Demokrat pastinya tidak terlepas dari bagaimana partai ini mengelola partainya dari segi bangunan internalnya. Hal ini telah mulai dibangun oleh Partai Nasional Demokrat baik di kota maupun di daerah-daerah dengan membentuk Partai Nasional Demokrat hingga ke pelosok yang dikenal dengan istilah DPRt (Dewan Pimpinan Ranting) dan Organisasi Sayap sekalipun dengan hitungan waktu yang cukup singkat dengan pengurus dan anggota yang memadai dalam melaksanakan kegiatan partai. Dalam bahasan komunikasi politik terdapat beberapa elemen atau unsur yang mendukung yaitu komunikator, pesan, medium, penerima pesan, dan respon.<sup>3</sup>

Nasional Demokrat dalam melakukan komunikasi partai politik telah melakukan beberapa upaya yang kita hanya dapat melihat hasilnya saja. Sebagaimana yang kita ketahui kegiatan komunikasi politik tidaklah mudah begitupula dalam melakukan serangkaian tindakan pendukung komunikasi politik, dari kesemuanya itu membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu politik (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), hal. 116

serangkaian kegiatan komunikasi politik yang dilakukan Partai Nasional Demokrat sehingga Partai tersebut dapat menang dalam pemilu 2014 bersaing dengan partai besar lainnya. Komunikasi politik sangatlah penting terutama bagi partai baru seperti Partai Nasional Demokrat ini, dan lebih lanjut akan dibahas pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud mengungkap lebih jauh lagi bagaimana komunikasi politik yang dilakukan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai Nasional Demokrat sehingga partai baru yang memiliki slogan *restorasi* ini dapat menarik perhatian masyarakat banyak dan memperoleh suara yang cukup signifikan di pemilu 2014, bahkan saat ini telah menjadi salah satu partai yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan bersaing dengan partai besar yang telah terbentuk sejak lama.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Partai Politik Nasional Demokrat dalam melakukan komunikasi politik ?
- 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan besarnya Partai Nasional Demokrat dalam waktu singkat ?
- 3. Bagaimanakah pola komunikasi Politik Partai Nasional Demokrat?
- 4. Bagaimana proses awal komunikasi politik yang dilakukan partai Nasional Demokrat?
- 5. Apa hal yang mendukung berjalannya komunikasi politik partai Nasional Demokrat ?

6. Unsur apa saja yang berperan dalam proses komunikasi politik Partai Nasional demokrat ?

### C. Pembatasan Masalah

Banyak hal yang dapat dikaji tentang Partai Nasional Demokrat, untuk lebih spesifik agar penelitian tidak meluas maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan. Penelitian ini lebih menyoroti Partai Nasional Demokrat sebagai salah satu partai baru yang lolos verivikasi dan berhasil menang di pemilu tahun 2014. Peneliti membatasi masalah Partai Nasional Demokrat dari sisi strategi dan proses berjalannya strategi komunikasi politiknya dilihat selama kurang lebih dua tahun setelah terbentuknya partai tersebut.

## D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah strategi komunikasi politik Partai Nasional Demokrat di DPP Partai Nasional Demokrat sebagai Partai yang baru terbentuk?
- 2. Bagaimanakah alur berjalannya strategi Komunikasi Politik Partai Nasdem yang terjadi?

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain:.

## 1) Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan salah satu fungsi partai politik dan proses berjalannya komunikasi politik Partai Nasional Demokrat di Dewan Pimpinan Pusat yang mampu menarik partisipasi khalayak.

# 2) Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

# 3) Civitas akademik

Bagi Jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya tentang komunikasi politik dari suatu partai politik.

# 4) Partai Nasional Demokrat

Bagi Partai Nasdem dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam proses pelaksanaan komunikasi politik demi kemajuan partai Nasional Demokrat kedepannya yang lebih baik.